

DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN

2021



RENCANA KERJA (RENJA)



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts.101/DPMPTSP/2021

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 154 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
 - b. bahwa dokumen perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmtsp.kabpangandaran@gmail.com

- Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

- 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82);
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67)
37. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.63/DPMPTSP/2019 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perencanaan Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

- di Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Kepala DPMPTSP adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
 3. Rencana Strategis (Renstra) adalah Renstra DPMPTSP yang merupakan Dokumen pedoman Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) Tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan Perubahan numenklatur. Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai acuan perencanaan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
 4. Rencana Kerja (Renja) adalah Renja dalam hal ini merupakan Dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2021 yang digunakan sebagai perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA

Pasal 2

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan Sistematika sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Terhadap RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan
- 2.2 Permasalahan yang Ada pada Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Berjalan

BAB IV PENUTUP

B AB III

ISI DAN URAIAN RENJA

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan (SK) ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dijadikan pedoman penyusunan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Kepala DPMPTSP ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di : Parigi

Pada Tanggal : 19 Juli 2021

a.n BUPATI PANGANDARAN,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN,



DR. SOBIRIN, S.Pd., M.Pd

NIP 196308181984101005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, ini dapat dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan. Dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini disusun sebagai upaya mengarahkan semua unsur kekuatan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP. Penyusunan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang nantinya Perubahan Renja ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Diharapkan dokumen ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh Pegawai/staff DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dan *Stake Holder* terkait dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan pelayanan perizinan sesuai Visi dan Misi yang telah disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pelayanan perizinan bersifat sinergis, koordinatif dan dapat saling melengkapi.

Penyusun menyadari bahwa dalam perumusan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan senantiasa Penyusun terima dengan terbuka untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang demi terwujudnya sebuah pelayanan prima DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

Demikian Penyusun sampaikan sebagai pengantar, atas penyajian dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. Semoga DPMPTSP Kabupaten Pangandaran mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja dan kinerja. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Parigi, 19 Juli 2021
Salam hormat,

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i

Daftar Isi.....ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 2

 1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan..... 6

 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II..... 9

 2.1 Evaluasi Renja Terhadap RKPD Sampai Dengan Triwulan II..... 9

 2.2 Permasalahan yang Ada pada Perangkat Daerah..... 34

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 37

 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020..... 37

BAB IV PENUTUP..... 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Demikian halnya pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Dokumen Perubahan Renja DPPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Dokumen Perubahan Renja dianggap penting dalam sistem perencanaan daerah, karena dapat menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, Perubahan Renja pun menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Perubahan Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Menyikapi perkembangan setelah penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka Perubahan Renja DPMPTSP mengacu Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021. Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 juga diselaraskan dengan Renja Provinsi Jawa Barat khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan kewajiban bagi DPMPTSP. Hal ini dilakukan selain untuk mengakomodir program dan kegiatan DPMPTSP, juga tentunya untuk menerapkan dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang di dalam penjabaran Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran sebagaimana diinginkan oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Pangandaran.

Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah pedoman kerja dan dokumen yang diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 pun dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi penyelenggaraan kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur yang dapat memacu perbaikan kinerja pada tahun mendatang, terutama peningkatan kualitas sumber daya aparatur pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);

33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82);
36. bahwa rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67)
37. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.63/DPMPTSP/2019 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan atas penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 antara lain adalah :

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 antara lain adalah :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan tahunan yang menjamin adanya sinergitas perumusan kondisi atau masalah, penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian pengaduan, dan kebijakan pelaporan layanan;
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian pengaduan, dan kebijakan pelaporan layanan bagi seluruh penyelenggara tugas pokok dan fungsi

DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas.

1.3.2 Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Tujuan dan dasar pertimbangan perubahan penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 antara lain adalah :

1. Mengevaluasi kinerja capaian program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan kondisi pembangunan Kabupaten Pangandaran;
2. Mengarahkan capaian yang diampu DPMPTSP Kabupaten Pangandaran ke dalam suatu strategi pembangunan yang membantu pencapaian Visi dan Misi Daerah;
3. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai target pada tahun rencana serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber dana.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyesunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan perturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sitematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triiwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II pada Tahun berjalan (Tahun n), mengacu

pada APBD tahun berjalan (Tahun n).

2.2 Permasalahan yang Ada pada Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Memuat uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUSI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana. Output dari evaluasi bertujuan untuk melihat berapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik, yang kemudian dijadikan umpan balik (masukan) untuk melakukan perencanaan tahun berikutnya. Perencanaan merupakan penyusunan tahap-tahap kegiatan masa yang akan datang dengan memperhatikan sumber daya, potensi dan tantangan dengan tetap memperhatikan informasi dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Total nilai dari keseluruhan pelaksanaan program didasarkan kepada bobot antara lain besar anggaran, manfaat dan kemudahan pencapaian.

Dari hasil evaluasi, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan membandingkan antara output dan input, baik untuk rencana maupun realisasi. Identifikasi indikator program, dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 terangkum ke dalam rencana kerja berikut ini :

- 1) Program
 - a. Input 6 Program
 - b. Output 6 Program
 - c. Outcome 6 Program
- 2) Kegiatan
 - a. Input 15 kegiatan
 - b. Output 15 kegiatan
 - c. Outcome 15 kegiatan
- 3) Sub Kegiatan
 - a. Input 50 Sub kegiatan
 - b. Output 50 Sub kegiatan
 - c. Outcome 50 Sub kegiatan

Pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2021 (s.d Triwulan II), secara finansial didukung oleh APBD Kabupaten Pangandaran dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Jawa Barat yang tertuang sebagaimana data pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Terhadap RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran

N O .	K O D E	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.035.952.452		1.071.745.230		556.862.432						1.628.607.662		40,35	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. CAKUPAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS 2. CAKUPAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK 3. CAKUPAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 4. CAKUPAN SARANA PRASARANA KANTOR YANG TERPENUHI 5. CAKUPAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	1. NILAI 2. NILAI 3. PERSENTASE 4. PERSENTASE 5. PERSENTASE		3.006.285.257		1.071.247.730		282.591.886						1.353.839.616		45,03	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH/JENIS DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JENIS DOKUMEN/ LAPORAN	3 JENIS DOKUMEN/ LAPORAN	27.744.000	3	1.700.000	3	11.244.000					6,00	12.944.000	3,00	46,66	
		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN REALISASI EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	LAPORAN	3 LAPORAN														

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	DOKUMEN	6 DOKUMEN	22.600.000	1	1.700.000	2	9.100.000					3,00	10.800.000	#VALUE!	47,79	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	LAPORAN	3 LAPORAN	5.144.000	0	-	2	2.144.000					2,00	2.144.000	#VALUE!	41,68	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH/JENIS LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JENIS LAPORAN	3 JENIS LAPORAN	2.310.142.031	3	1.014.641.231	3	43.344.000					6,00	1.057.985.231	3,00	45,80	
		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN ASN YANG DISEDIAKAN	OB	16 OB	2.189.442.031	16	1.012.941.231	16	32.600.000					32,00	1.045.541.231	#VALUE!	47,75	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SE MESTERAN SKPD	LAPORAN	2 LAPORAN	1.656.000									-	-	#VALUE!	-	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	LAPORAN	1 LAPORAN	96.444.000	0	-	1	1.644.000					1,00	1.644.000	#VALUE!	1,70	
		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN &PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	SISTEM/LAPORAN	1 SISTEM/LAPORAN	22.600.000	1	1.700.000	1	9.100.000					2,00	10.800.000	#VALUE!	47,79	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	20.600.000		1.700.000		9.100.000					-	10.800.000	#VALUE!	52,43	
		PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	20.600.000	1	1.700.000	1	9.100.000					2,00	10.800.000	#VALUE!	52,43	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	22.600.000		1.700.000		9.100.000					-	10.800.000	#VALUE!	47,79	
		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	22.600.000	1	1.700.000	1	9.100.000					2,00	10.800.000	#VALUE!	47,79	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	19.200.000		1.400.000		7.600.000					-	9.000.000	#VALUE!	46,88	
		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	19.200.000	1	1.400.000	1	7.600.000					8,00	9.000.000	#VALUE!	46,88	
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	JUMLAH/JENIS PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	JENIS	0 JENIS														
		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA YANG DIADAKAN	SETEL	16 SETEL														



NO	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN REALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	LAPORAN	1 LAPORAN														
		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	JUMLAH LAPORAN REALISASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	LAPORAN	1 LAPORAN														
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	OK	16 OK														
		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	JUMLAH/JENIS KEGIATAN/MEDIA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILAKSANAKAN	JENIS MEDIA	2 JENIS MEDIA														
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH/JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH YANG DISEDIAKAN	JENIS PELAYANAN	7 JENIS PELAYANAN	206.593.678	7	8.300.000	7	107.163.344					-	115.463.344	#VALUE!	55,89	
		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD YANG DIKEMBANGKAN	SISTEM/ WEBSITE	1 SISTEM/ WEBSITE	21.485.000									-	-	#VALUE!	-	
		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH DAN JENIS BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	JENIS	4 JENIS	29.591.270	1	2.025.000	1	7.786.254					2,00	9.811.254	#VALUE!	33,16	



NO	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH/JENIS KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	JENIS	4 JENIS	989.600	0	-	1	240.000					1,00	240.000	#VALUE!	24,25	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	JUMLAH/JENIS PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	JENIS	5 JENIS	13.490.798	1	110.000	2	7.335.501					3,00	7.445.501	#VALUE!	55,19	
		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH DAN JENIS BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	EKSEMPLAR / BULAN	12 EKSEMPLAR/ BULAN	15.600.000	3	2.280.000	3	6.490.000					6,00	8.770.000	#VALUE!	56,22	
		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1. JUMLAH KEGIATAN DAN LAPORAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD YANG DISELENGGARAKAN (KONSULTASI DAN KOORDINASI KE LUAR DAERAH) 2. JUMLAH KEGIATAN DAN LAPORAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD YANG DISELENGGARAKAN (KONSULTASI DAN KOORDINASI KE DALAM DAERAH)	1. KEGIATAN/ LAPORAN 2. KEGIATAN/ LAPORAN	1. 10 KEGIATAN/ LAPORAN 2.15 KEGIATAN/ LAPORAN	72.208.000	2	3.885.000	11	34.426.909					13,00	38.311.909	#VALUE!	53,06	
		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	JENIS/UNIT/ BUAH	69 JENIS/UNIT/BUAH	53.229.010	0	-	69	50.884.680					69,00	50.884.680	#VALUE!	95,60	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DISEDIAKAN	JENIS JASA	3 JENIS JASA	186.221.700		20.881.947		58.085.396					-	78.967.343	#VAL UE!	42,41	
		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA YANG DISEDIAKAN	MATERAI	110 MATERAI	1.100.000	0	-	109	1.090.901					109,00	1.090.901	#VAL UE!	99,17	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH REKENING JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	REKENING/ BULAN	2 REKENING/ BULAN	47.021.700	2	10.935.099	2	22.971.665					4,00	33.906.764	#VAL UE!	72,11	
		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1. JUMLAH JASA KEAMANAN KANTOR YANG DISEDIAKAN 2. JUMLAH JASA KEBERSIHAN KANTOR YANG DISEDIAKAN 3. JUMLAH JASA PENGEMUDI KANTOR YANG DISEDIAKAN 4. JUMLAH JASA PENGELOLAAN WEBSITE KANTOR YANG DISEDIAKAN 5. JUMLAH/JENIS LAYANAN MAKAN MINUM YANG DISEDIAKAN	1. OB 2. OB 3.OB 4.SISTEM/ WEBSITE 5. JENIS	1. 24 OB 2. 24 OB 3. 12 OB 4. 1 SISTEM/ WEBSITE 5. 4 JENIS	138.100.000	1. 6 OB 2. 6 OB 3.6 OB 4. 1 Sistem/ website 5. 4 Jenis	9.946.848	1. 12OB 2. 12 OB 3.6 OB 4. 1 Sistem/ website 5. 4 Jenis	34.022.830					#VAL UE!	43.969.678	#VAL UE!	31,84	
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIADAKAN	JENIS PENGADAA N BMD	6 JENIS PENGADAAN BMD	115.667.000		7.550.000		-					-	7.550.000	#VAL UE!	6,53	
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH DAN JENIS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIADAKAN	JENIS	4 JENIS												#VAL UE!	#DIV/0 !	

NO	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIADAKAN	JENIS	4 JENIS	55.610.000	1	7.550.000							1,00	7.550.000	#VALUE!	13,58	
		PENGADAAN MEBEL	JUMLAH DAN JENIS MEBELAIR YANG DIADAKAN	JENIS	4 JENIS	60.057.000													
		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIADAKAN	UNIT	0 UNIT														
		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIADAKAN	UNIT	0 UNIT														
		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1. JUMLAH GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIADAKAN 2. JUMLAH DOKUMEN PENDUKUNG PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (DED) 3. JUMLAH SHELTER PELAYANAN PUBLIK YANG DIADAKAN	1. GEDUN 2.DOKUMEN 3. SHELTER	1. 0 GEDUNG 2. 0 DOKUMEN 3. 0 SHELTER														
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIPELIHARA	JENIS PEMELIHARAAN BMD	4 JENIS PEMELIHARAAN BMD	97.516.848		13.374.552		36.955.146					-	50.329.698	#VALUE!	51,61	

N O	K O D E	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(RP)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		PEMELIHARAAN/R EHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH/LUAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ DIREHABILITASI	GEDUNG DAN M2	1 GEDUNG (640 M2)	14.860.000			1	85.000					1,00	85.000	#VAL UE!	0,57	
		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	UNIT	1 UNIT	33.140.848	1	5.200.000	1	16.150.000					2,00	21.350.000	#VAL UE!	64,42	
		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	UNIT	5 UNIT	45.766.000	5	8.174.552	5	20.580.146					10,00	28.754.698	#VAL UE!	62,83	
		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH/JENIS PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	JENIS	3 JENIS	3.750.000	0	-	1	140.000					1,00	140.000	#VAL UE!	3,73	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	CAKUPAN PERTUMBUHAN JUMLAH INVESTOR	JUMLAH INVESTOR	137 INVESTOR	-			685 Investor								#VAL UE!	#DIV/ 0!	



NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		1. PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. JUMLAH DAN JENIS DOKUMEN/LAPORAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JENIS DOKUMEN/ LAPORAN	2 JENIS DOKUMEN/LAPO RAN	-											#VAL UE!		
		PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTI F DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH DOKUMEN CETAK BIRU (MASTER PLAN) PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 2. JUMLAH DOKUMEN FEASIBILITY STUDY POTENSI PELUANG INVESTASI 3. JUMLAH DOKUMEN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DITETAPKAN 4. JUMLAH KAJIAN DAN PELUANG INVESTASI DAERAH	1.DOKUMEN 2.DOKUMEN 3.DOKUMEN 4.DOKUMEN	1. 1 DOKUMEN 2. 1 DOKUMEN 3. 1 DOKUMEN 4. 1 DOKUMEN														
		EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTI F DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH KEGIATAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 2. JUMLAH KEGIATAN PELAPORAN REALISASI PMA & PMDN	1.KEGIATAN/ LAPORAN 2.KEGIATAN/ LAPORAN	1. 2 KEGIATAN/ LAPORAN 2. 2 KEGIATAN/ LAPORAN														



NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		2. PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DAN JENIS DOKUMEN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	JENIS DOKUMEN	2 JENIS DOKUMEN	-											#VAL UE!	#DIV/0 !	
		PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DOKUMEN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA	DOKUMEN	1 DOKUMEN												#VAL UE!	#DIV/0 !	
		PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DOKUMEN KAJIAN PELUANG USAHA DAN PETA POTENSI USAHA KABUPATEN/KOTAUSAHA KABUPATEN/KOTA	DOKUMEN	1 DOKUMEN														
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	CAKUPAN PENINGKATAN PELUANG INVESTASI YANG TERPUBLIKASI	%	10%	65.681.000		-	9%	62.290.000					-	62.290.000	-	94,84	
		1. PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH/JENIS DOKUMEN/LAPORAN EVENT PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DOKUMEN/ LAPORAN	2 DOKUMEN/ LAPORAN	65.681.000		-	2	62.290.000					-	62.290.000	#VAL UE!	94,84	
		PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH/JENIS KEGIATAN/MEDIA STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL 2. JUMLAH KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL/ INVESTASI YANG DIJALIN 3. JUMLAH PELAPORAN REALISASI PMA DAN PMDN 4. JUMLAH DOKUMEN KAJIAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	1. KEGIATAN/ MEDIA 2. KEGIATAN/ LAPORAN 3. DOKUMEN 4. DOKUMEN	1. 2 KEGIATAN/ MEDIA 2. 1 KEGIATAN/ LAPORAN 3. 1 LAPORAN 4. 1 DOKUMEN														



NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN EVENT/PAMERAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG DIKUTI	LAPORAN/ PAMERAN	2 LAPORAN/ PAMERAN	65.681.000	0	-	2	62.290.000					2	62.290.000	#VALUE!	94,84	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	CAKUPAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL	%	70%	591.584.545		497.500	70%	169.701.746					70%	170.199.246	-	28,77	
		1. PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	JUMAH JANGKA WAKTU PENERBITAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG TEPAT WAKTU SESUAI SOP	HARI KERJA	7 HARI KERJA	591.584.545	7	497.500	7	169.701.746					14,00	170.199.246	#VALUE!	28,77	
		PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	1. JUMLAH/JENIS KEGIATAN/PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 2. JUMLAH/JENIS KEGIATAN/PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE SERVICE YANG DIKELOLA	1. KEGIATAN/ SISTEM 2. KEGIATAN/ SISTEM	1. 2 KEGIATAN/ SISTEM 2. 2 KEGIATAN/ SISTEM	59.796.700	2	497.500	2	4.356.746					4,00	4.854.246	#VALUE!	8,12	

NO	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH DOKUMEN PENGAJUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIEVALUASI DAN DIVERIFIKASI 2. JUMLAH OBJEK PERIZINAN YANG TERIDENTIFIKASI 3. JUMLAH OBJEK PENDAPATAN YANG DI INTENSIFIKASI DAN DI EKSTENSIFIKASI 4. JUMLAH LAPORAN POTENSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 5. JUMLAH SEBARAN SOSIALISASI PELAYANAN PERIJJINAN YANG DISELENGGARAKAN	1.DOKUMEN 2. OBJEK PERIZINAN 3. OBJEK PENDAPATAN 4. LAPORAN 5. DESA	1.250 DOKUMEN 2. 250 OBJEK PERIZINAN 3. 250 OBJEK PENDAPATAN 4. 1 LAPORAN 5. 15 DESA	499.476.000			1)610 Dok 2)610 Objek Perizinan 3)610 Objek Pendapatan 4)1 Laporan 5) 0 Desa	156.800.000					#VAL UE!	156.800.000	#VAL UE!	31,39	
		PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN PENYELESAIAN PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN YANG TERTANGANI	TAHUN PELAYANAN	1 TAHUN PELAYANAN	32.311.845			1	8.545.000					1,00	8.545.000	#VAL UE!	26,45	
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTI F DAERAH	1. JUMLAH DOKUMEN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH YANG DITETAPKAN DAN/ATAU YANG DIKAJI 2. JUMLAH LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 3. JUMLAH LAPORAN PERSEPSI KORUPSI	1. DOKUMEN 2. LAPORAN 3. LAPORAN	1. N/A DOKUMEN 2. 1 LAPORAN 3. 1 LAPORAN												#VAL UE!		

N O .	K O D E	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	CAKUPAN KEPATUHAN PENDATAAN NILAI INVESTASI PMDN & PMA TERHADAP PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI DAERAH	MILYAR RUPIAH	322,1 MILYAR RUPIAH	372.401.650		-	249,67	42.278.800					-	42.278.800	#VAL UE!	11,35	
		1. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH/JENIS KEGIATAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN	JENIS KEGIATAN	3 JENIS KEGIATAN	372.401.650		-	1	42.278.800					-	42.278.800	#VAL UE!	11,35	
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH DATA PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIANALISA 2. JUMLAH KUNJUNGAN KE LOKASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG DIFOKUSKAN PADA PEMANTAUAN TERHADAP REALISASI INVESTASI 3. JUMLAH VERIFIKASI DAN EVALUASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) YANG DISAMPAIKAN OLEH PELAKU USAHA UNTUK SELANJUTNYA DITERUSKAN KE BKPM MELALUI SISTEM OSS	1. KEGIATAN/ LAPORAN 2. KEGIATAN/ LAPORAN 3. KEGIATAN/ LAPORAN	1) 9 KEGIATAN/ LAPORAN 2) 9 KEGIATAN/ LAPORAN 3) 9 KEGIATAN/ LAPORAN	50.820.000			1	16.820.000					1	16.820.000	#VAL UE!	33,10	DAK NON FISIK

NO	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS SISTEM OSS DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM LKPM ONLINE 2. JUMLAH SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN SOSIALISASI KEMITRAAN USAHA YANG DISELENGGARAKAN	1. KEGIATAN/ LAPORAN 2. KEGIATAN/ LAPORAN	1) 9 KEGIATAN/ LAPORAN 2) 9 KEGIATAN/ LAPORAN	227.201.800	0	-	1	25.458.800					1	25.458.800	#VALUE!	11,21	DAK NON FISIK
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH FASILITASI PERMASALAHAN PERUSAHAAN DALAM MEREALISASIKAN INVESTASINYA 2. JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN KE LOKASI PROYEK DALAM RANGKA PENGAWASAN 3. JUMLAH PELAKSANAAN PERIZINAN DAN/ATAU PERIZINAN BERUSAHA YANG DIEVALUASI	1. KEGIATAN/ LAPORAN 2. KEGIATAN/ LAPORAN 3. KEGIATAN/ LAPORAN	1) 14 KEGIATAN/ LAPORAN 2) 14 KEGIATAN/ LAPORAN 3) 14 KEGIATAN/ LAPORAN	94.379.850													DAK NON FISIK
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	CAKUPAN PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	%	3%	-		-		-					-	-	-	#DIV/0!	
		1. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	LAPORAN	1 LAPORAN	-		-		-							#VALUE!	#DIV/0!	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (DPA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT) (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		KET.
							I		II		III		IV						
			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100		12
		PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	JUMLAH LAPORAN PEMANFAATAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	LAPORAN	1 LAPORAN												#VALUE!		

2.1.1 Evaluasi Target Kinerja dan Anggaran Terhadap RKPD Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

A. Pelaksanaan Program Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.006.285.257,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 1.353.839.616,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD; (2)tercapainya peningkatan kualitas administrasi keuangan; (3)tercapainya peningkatan pelayanan administrasi; (4)tersedianya sarana prasarana kantor; dan (5)tercapainya peningkatan kompetensi aparatur. Program ini diimplementasikan ke dalam 9 (sembilan) kegiatan dan didukung oleh 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan, sebagaimana penjelasan dibawah ini :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 27.744.000,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 12.944.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - 1.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan realisasi evaluasi perangkat daerah.
 - 1.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 22.600.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 10.800.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.144.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 2.144.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan realisasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.310.142.031,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 1.057.985.231,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah.
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.189.442.031,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 1.045.541.231,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN.

- 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.656.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 0,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 96.444.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 1.644.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD.
 - 2.4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 22.600.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 10.800.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan pada sistem pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 20.600.000,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 10.800.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan pada sistem administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
 - 3.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 20.600.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 10.800.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan pada sistem perencanaan pengelolaan retribusi daerah.
 - 4) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 22.600.000,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 10.800.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan pada sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah.
 - 4.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 22.600.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 10.800.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan pada sistem penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.
 - 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 19.200.000,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 9.000.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
 - 5.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar Rp 19.200.000,- yang mana s.d TW II terealisasi

sebesar Rp 9.000.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan pada sistem informasi kepegawaian.

- 5.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana peningkatan disiplin pegawai.
 - 5.3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
 - 5.4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan realisasi administrasi kepegawaian.
 - 5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan realisasi penilaian kinerja pegawai.
 - 5.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
 - 5.7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan/media sosialisasi peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 206.593.678,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 115.463.344,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah.
- 5.1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.485.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 0,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.
 - 5.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 29.591.270,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 9.811.254,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan.
 - 5.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 989.600,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 240.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

- 5.4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp 13.490.798,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 7.445.501,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga.
- 5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.600.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 8.770.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan.
- 5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 72.208.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 38.311.909,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (konsultasi dan koordinasi ke luar daerah); dan (2)terselenggaranya laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah).
- 5.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 53.229.010,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 50.884.680,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 186.221.700,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 78.967.343,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 1.090.901,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya materai dan benda pos lainnya.
- 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp 47.021.700,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 33.906.764,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 138.100.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 43.969.678,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)tersedianya jasa keamanan kantor; (2)tersedianya jasa kebersihan kantor; (3)tersedianya jasa pengemudi kantor; (4)tersedianya jasa pengelolaan website kantor; dan (5) tersedianya layanan makanan dan minuman.
- 8) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 115.667.000,00 yang mana s.d TW II

teralisasi sebesar Rp 7.550.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

- 8.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - 8.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 55.610.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 7.550.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya.
 - 8.3 Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp 60.057.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 0,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya mebelair.
 - 8.4 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - 8.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - 8.6 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya; (2)tersedianya dokumen pendukung pembangunan gedung kantor (DED); dan (3) tersedianya shelter pelayanan publik.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 97.516.848,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 50.329.698,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- 9.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 14.860.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 85.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - 9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 33.140.848,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 21.350.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan.

- 9.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 45.766.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 28.754.698,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
- 9.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.750.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 140.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya perumbuhan jumlah investor. Program ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan, sebagaimana penjelasan dibawah ini :
- 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen/laporan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
- 1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)tersedianya dokumen cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal; (2)tersedianya dokumen feasibility study potensi peluang investasi; (3)tersedianya dokumen profil potensi dan peluang investasi yang ditetapkan; dan (4)tersedianya kajian dan peluang investasi daerah.
- 1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)terlaksananya kegiatan dan pelaporan pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal; dan (2)terlaksananya kegiatan pelaporan realisasi PMA & PMDN.
- 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota.
- 2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten/Kota.

- 2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen kajian peluang usaha dan peta potensi usaha Kabupaten/Kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 65.681.000,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 62.290.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan kegiatan publikasi peluang investasi. Program ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, sebagaimana penjelasan dibawah ini:
- 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 65.681.000,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 62.290.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen/laporan event promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
- 1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)terselenggaranya kegiatan/media strategi promosi penanaman modal; (2)terjalinnnya kerjasama di bidang penanaman modal/ investasi; (3)tersedianya dokumen pelaporan realisasi PMA dan PMDN, dan (4)tersedianya dokumen kajian pengembangan penanaman modal.
- 1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 65.681.000,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 62.290.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan event/ pameran promosi penanaman modal yang diikuti.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 591.584.545,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 170.199.246,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal. Program ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan, sebagaimana penjelasan dibawah ini :
- 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 591.584.545,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 170.199.246,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya ketepatan jangka waktu penerbitan pelayanan perizinan dan

non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota sesuai SOP.

- 1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp 59.796.700,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 4.854.246,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)terselenggaranya kegiatan/pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan (2)terselenggaranya kegiatan pengelolaan pelayanan perizinan berbasis online service.
- 1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp 499.476.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 156.800.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)tersedianya dokumen pengajuan perizinan dan non perizinan yang dievaluasi dan diverifikasi; (2)tersedianya data identifikasi objek perizinan; (3)tersedianya data intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan; (4)tersedianya laporan potensi perizinan dan non perizinan, (5)terselenggaranya sosialisasi pelayanan perijinan.
- 1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan pagu anggaran sebesar Rp 32.311.845,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 8.545.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan penanganan dan penyelesaian pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- 1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)tersedianya dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah yang ditetapkan dan/atau yang dikaji; (2)tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat; dan (3)tersedianya laporan persepsi korupsi.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 372.401.650,00 yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 42.278.800,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya kepatuhan PMDN & PMA dalam melaporkan nilai investasinya. Program ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, sebagaimana penjelasan dibawah ini :
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 372.401.650,-

yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 42.278.800,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

- 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp 50.820.000,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 16.820.000,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)tersedianya data analisa perizinan berusaha dan perizinan penanaman modal; (2)terlaksananya kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan pada pemantauan terhadap realisasi investasi; dan (3)terlaksananya verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui sistem OSS.
 - 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp 227.201.800,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 25.458.800,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)terselenggaranya bimbingan teknis sistem OSS dan bimbingan teknis sistem LKPM online; dan (2)terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal dan sosialisasi kemitraan usaha.
 - 1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp 94.379.850,- yang mana s.d TW II terealisasi sebesar Rp 0,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah (1)terlaksananya fasilitasi terhadap hambatan/permasalahan perusahaan dalam merealisasikan investasinya; (2)terlaksananya kegiatan pemeriksaan ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan; dan (3)terlaksananya kegiatan evaluasi perizinan dan/atau perizinan berusaha.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar 0,00 dan sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan kualitas data dan sistem informasi penanaman modal. Program ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, sebagaimana penjelasan dibawah ini :
- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota.

1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan pemanfaatan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2.2 Permasalahan yang ada pada perangkat daerah

Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena berdampak signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP untuk melaksanakan urusan di bidang penanaman modal adalah :

1. Masih terbatasnya investor yang masuk ke Kabupaten Pangandaran, dikarenakan belum tersedianya informasi yang lengkap tentang potensi daerah, sehingga belum mampu menarik investor secara maksimal. Di pihak lain juga masih kurangnya promosi potensi daerah terhadap investor yang bersifat sistimatis.
2. Semakin meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi;
3. Promosi investasi daerah belum secara optimal sehingga Kabupaten Pangandaran belum menjadi tujuan investasi secara nasional;
4. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi, regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Pangandaran.
5. Iklim investasi yang belum di dukung oleh fasilitas infrastruktur daerah dan kenyamanan yang memadai.
6. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan nonperijinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (karena sering berubahnya regulasi dan belum optimalnya regulasi tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan yang akan menunjang dalam pengembangan investasi).
7. Diperlukan optimalisasi penanganan pengaduan yang komprehensif dengan dukungan keterlibatan OPD teknis terkait.
8. Diperlukannya optimalisasi peran Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dalam proses pelayanan perijinan dan nonperijinan.

9. Belum semua layanan perizinan dan non perizinan menggunakan sistem online sehingga data tidak dapat diperoleh seketika, akibatnya pengambilan kebijakan belum berdasarkan informasi yang cukup.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi penyelenggaraan Renstra SKPD.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan nilai skor dengan kriteria-kriteria tersebut diatas, maka diperoleh tingkat prioritas program/isu strategi. Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanaman modal. Adapun isu strategis yang terkait dengan pelayanan DPMPTSP dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Implementasi konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara utuh utamanya untuk melaksanakan urusan penanaman modal.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kalangan dunia usaha/ investor.
3. Ketersediaan perangkat hukum dan peraturan pelaksana lainnya sebagai dasar legal formal pelayanan penanaman modal bagi investor.
4. Implementasi teknologi komunikasi dan informasi untuk pelaksanaan *e-government* dalam hal pelayanan perizinan.
5. Meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kemudahan berbisnis.
6. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online dengan mengembangkan system berbasis teknologi informasi.
7. Penyusunan rencana rinci tata ruang dan zonasi yang mengakomodir kegiatan investasi.
8. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat dalam pemrosesan permohonan izin yang mengikuti dinamika dunia usaha.
9. Koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Kota diharapkan dapat berjalan lebih baik dengan semangat peningkatan iklim investasi yang dapat menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Pangandaran.

10. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang khususnya di bidang teknologi informasi guna meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan perizinan.
11. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangandaran melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

BAB III

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan fokus pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Setelah dilakukan evaluasi capaian rencana kerja terhadap RKPD tahun 2021 pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran diperoleh hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana rincian penjelasan berikut ini :

A. PROGRAM

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. KEGIATAN

- 1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 2.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- 5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 6.3 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 6.4 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 6.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.8 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

C. SUB KEGIATAN

1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

1.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

1.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

1.2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

2.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

2.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

3.1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

4.1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

4.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6.1.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.1.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 6.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 6.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
- 6.2.4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
- 6.3.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 6.4.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 6.5.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 6.5.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 6.5.3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 6.5.4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 6.5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 6.5.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6.5.7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6.6.1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
- 6.6.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6.6.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- 6.6.4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 6.6.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6.6.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6.6.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 6.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6.8.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
- 6.8.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6.8.3 Pengadaan Mebel
- 6.8.4 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
- 6.8.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6.8.6 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6.9.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 6.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 6.9.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6.9.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Lampiran

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rekapitulasi Prioritas Program dan Kegiatan Prioritas pada Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A T A N
								INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)				(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.772.520.462,00	4.260.717.780,00	4.048.012.827,00	- 212.704.953,00	APBD KABUPATEN	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							2.772.520.462,00	4.260.717.780,00	4.048.012.827,00	- 212.704.953,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD 2. TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI KEUANGAN 3. TERCAPAINYA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 4. TERSEDIAANYA SARANA PRASARANA KANTOR 5. TERCAPAINYA PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	1. CAKUPAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS 2. CAKUPAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK 3. CAKUPAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI 4. CAKUPAN SARANA PRASARANA KANTOR YANG TERPENUHI 5. CAKUPAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	1. NILAI 2. NILAI 3. PERSENTASE 4. PERSENTASE 5. PERSENTASE			1. NILAI (66) 2. NILAI (66) 3. PERSENTASE (77%) 4. PERSENTASE (55%) 5. PERSENTASE (17%)	2.497.752.416,00	3.297.638.630,00	2.898.983.257,00	- 398.655.373,00	APBD KABUPATEN	
					PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH/JENIS DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JENIS DOKUMEN/ LAPORAN		3 JENIS DOKUMEN/ LAPORAN	3 JENIS DOKUMEN/ LAPORAN	12.944.000,00	32.144.000,00	26.144.000,00	-6.000.000,00	APBD KABUPATEN	
					EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA LAPORAN REALISASI EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN REALISASI EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	LAPORAN		3 LAPORAN	3 LAPORAN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A N	
								INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
							PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	DOKUMEN	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	10.800.000,00	27.000.000,00	21.000.000,00	-6.000.000,00	APBD KABUPATEN	
							KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	TERSEDIAANYA LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	LAPORAN	3 LAPORAN	3 LAPORAN	2.144.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00	-	APBD KABUPATEN	
							ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH/JENIS LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JENIS LAPORAN	3 JENIS LAPORAN	3 JENIS LAPORAN	2.201.898.031,00	2.314.542.031,00	2.308.542.031,00	-6.000.000,00	APBD KABUPATEN	
							PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	TERPENUHINYA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN ASN YANG DISEDIAKAN	OB	16 OB	16 OB	2.189.442.031,00	2.189.442.031,00	2.189.442.031,00	-	APBD KABUPATEN	
							KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	TERSEDIAANYA LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMES TERAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SE MESTERAN SKPD	LAPORAN	2 LAPORAN	2 LAPORAN	1.656.000,00	1.656.000,00	1.656.000,00	-	APBD KABUPATEN	
							KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	TERSEDIAANYA LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	-	96.444.000,00	96.444.000,00	-	APBD KABUPATEN	
							PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFI KASI KEUANGAN SKPD	TERSEDIAANYA LAPORAN PADA SISTEM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	10.800.000,00	27.000.000,00	21.000.000,00	-6.000.000,00	APBD KABUPATEN	
							ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	TERSEDIAANYA LAPORAN PADA SISTEM ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	10.800.000,00	22.920.000,00	21.000.000,00	-1.920.000,00	APBD KABUPATEN	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A N
								INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	TERSEDINYA LAPORAN PADA SISTEM PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM PERENCANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	10.800.000,00	22.920.000,00	21.000.000,00	-1.920.000,00	APBD KABUPATEN	
						ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	TERSEDINYA LAPORAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	SISTEM/ LAPORAN	1 LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	10.800.000,00	27.000.000,00	21.000.000,00	-6.000.000,00	APBD KABUPATEN	
						PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	TERSEDINYA LAPORAN PADA SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	10.800.000,00	27.000.000,00	21.000.000,00	-6.000.000,00	APBD KABUPATEN	
						ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	TERSEDINYA LAPORAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	9.000.000,00	22.920.000,00	17.400.000,00	-5.520.000,00	APBD KABUPATEN	
						KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	TERSEDINYA LAPORAN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	1 SISTEM/ LAPORAN	9.000.000,00	22.920.000,00	17.400.000,00	-5.520.000,00	APBD KABUPATEN	
						PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	JUMLAH/JENIS PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	JENIS	0 JENIS	0 JENIS	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
						PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	TERPENUHIYA KEBUTUHAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA YANG DIADAKAN	SETEL	0 SETEL	16 SETEL	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
						PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	TERSEDINYA LAPORAN REALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN REALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
						MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	TERSEDINYA LAPORAN REALISASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	JUMLAH LAPORAN REALISASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	OK	16 OK	16 OK	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A N
								INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	TERSELENGGARANYA KEGIATAN/MEDIA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	JUMLAH/JENIS KEGIATAN/MEDIA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILAKSANAKAN	JENIS MEDIA	2 JENIS MEDIA	2 JENIS MEDIA	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	TERPENUHUNYA PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH/JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH YANG DISEDIAKAN	JENIS PELAYANAN	7 JENIS PELAYANAN	7 JENIS PELAYANAN	115.463.344,00	299.452.356,00	208.208.678,00	-91.243.678,00	APBD KABUPATEN	
						DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	TELAKSANYA PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD YANG DIKEMBANGKAN	SISTEM/ WEBSITE	1 SISTEM/ WEBSITE	1 SISTEM/ WEBSITE	-	36.000.000,00	-	-36.000.000,00	APBD KABUPATEN	
						PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	TERSEDIAANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH DAN JENIS BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	JENIS	4 JENIS	4 JENIS	9.811.254,00	29.177.850,00	29.591.270,00	413.420,00	APBD KABUPATEN	
						PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERAN GAN BANGUNAN KANTOR	TERSEDIAANYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH/JENIS KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	JENIS	4 JENIS	4 JENIS	240.000,00	989.600,00	1.589.600,00	600.000,00	APBD KABUPATEN	
						PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	TERSEDIAANYA PERALATAN RUMAH TANGGA	JUMLAH/JENIS PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	JENIS	5 JENIS	5 JENIS	7.445.501,00	-	33.490.798,00	33.490.798,00	APBD KABUPATEN	
						PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	TERSEDIAANYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	JUMLAH DAN JENIS BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	EKSEMPLAR/ BULAN	12 EKSEMPLAR/ BULAN	12 EKSEMPLAR/ BULAN	8.770.000,00	17.388.000,00	18.100.000,00	712.000,00	APBD KABUPATEN	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A N
									INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							PENYELENGGARA AN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.TERSELENGGARANYA RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (KONSULTASI DAN KOORDINASI KE LUAR DAERAH) 2. TERSELENGGARANYA RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (KONSULTASI DAN KOORDINASI KE DALAM DAERAH)	1. JUMLAH KEGIATAN DAN LAPORAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD YANG DISELENGGARAKAN (KONSULTASI DAN KOORDINASI KE LUAR DAERAH) 2. JUMLAH KEGIATAN DAN LAPORAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD YANG DISELENGGARAKAN (KONSULTASI DAN KOORDINASI KE DALAM DAERAH)	1. KEGIATAN/ LAPORAN 2. KEGIATAN/ LAPORAN	1. 140 KEGIATAN/ LAPORAN 2. 0 KEGIATAN/ LAPORAN	1. 10 KEGIATAN/ LAPORAN 2.15 KEGIATAN/ LAPORAN	38.311.909,00	149.885.000,00	72.208.000,00	-77.677.000,00	APBD KABUPATEN	
							PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	TERSEDIAANYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	JENIS/UNIT/ BUAH	69 JENIS/UNIT/ BUAH	69 JENIS/UNIT/ BUAH	50.884.680,00	66.011.906,00	53.229.010,00	-12.782.896,00	APBD KABUPATEN	
							PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DISEDIAKAN	JENIS JASA	3 JENIS JASA	3 JENIS JASA	78.967.343,00	212.896.700,00	189.621.700,00	-23.275.000,00	APBD KABUPATEN	
							PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	TERSEDIAANYA MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	JUMLAH MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA YANG DISEDIAKAN	MATERAI	110 MATERAI	110 MATERAI	1.090.901,00	1.100.000,00	2.500.000,00	1.400.000,00	APBD KABUPATEN	
							PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	TERSEDIAANYA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH REKENING JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	REKENING/ BULAN	2 REKENING/ BULAN	2 REKENING/ BULAN	33.906.764,00	50.021.700,00	47.021.700,00	-3.000.000,00	APBD KABUPATEN	
							PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1. TERSEDIAANYA JASA KEAMANAN KANTOR 2. TERSEDIAANYA JASA KEBERSIHAN KANTOR 3. TERSEDIAANYA JASA PENGEMUDI KANTOR 4. TERSEDIAANYA JASA PENGELOLA WEBSITE KANTOR 5. TERSEDIAANYA LAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	1. JUMLAH JASA KEAMANAN KANTOR YANG DISEDIAKAN 2. JUMLAH JASA KEBERSIHAN KANTOR YANG DISEDIAKAN 3. JUMLAH JASA PENGEMUDI KANTOR YANG DISEDIAKAN 4. JUMLAH JASA PENGELOLAAN WEBSITE KANTOR YANG DISEDIAKAN 5. JUMLAH/JENIS LAYANAN MAKAN MINUM YANG DISEDIAKAN	1) OB 2) OB 3) OB 4) SISTEM/ WEBSITE 5) JENIS	1) 24 OB 2) 24 OB 3) 12 OB 4) 1 SISTEM/ WEBSITE 5) 4 JENIS	1) 24 OB 2) 24 OB 3) 12 OB 4) 1 SISTEM/ WEBSITE 5) 4 JENIS	43.969.678,00	161.775.000,00	140.100.000,00	-21.675.000,00	APBD KABUPATEN	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A N
								INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TERSEDINYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIADAKAN	JENIS PENGADAAN BMD	6 JENIS PENGADAAN BMD	6 JENIS PENGADAAN BMD	7.550.000,00	257.064.323,00	7.550.000,00	- 249.514.323,00	APBD KABUPATEN	
						PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH DAN JENIS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIADAKAN	JENIS	4 JENIS	4 JENIS	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
						PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	TERSEDINYA PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIADAKAN	JENIS	4 JENIS	4 JENIS	7.550.000,00	207.758.763,00	7.550.000,00	- 200.208.763,00	APBD KABUPATEN	
						PENGADAAN MEBEL	TERSEDINYA MEBELAIR	JUMLAH DAN JENIS MEBELAIR YANG DIADAKAN	JENIS	4 JENIS	4 JENIS	-	49.305.560,00	-	-49.305.560,00	APBD KABUPATEN	
						PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	TERSEDINYA KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIADAKAN	UNIT	0 UNIT	0 UNIT	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
						PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	TERSEDINYA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIADAKAN	UNIT	0 UNIT	0 UNIT	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
						PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1. TERSEDINYA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2. TERSEDINYA DOKUMEN PENDUKUNG PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (DED) 3. TERSEDINYA SHELTER PELAYANAN PUBLIK	1. JUMLAH GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIADAKAN 2. JUMLAH DOKUMEN PENDUKUNG PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (DED) 3. JUMLAH SHELTER PELAYANAN PUBLIK YANG DIADAKAN	1. GEDUNG 2. DOKUMEN 3. SHELTER	1. 0 GEDUNG 2. 0 DOKUMEN 3. 0 SHELTER	1. 0 GEDUNG 2. 0 DOKUMEN 3. 0 SHELTER	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TERPENUHINYA PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIPELIHARA	JENIS PEMELIHARAA N BMD	4 JENIS PEMELIHARA AN BMD	4 JENIS PEMELIHARAA N BMD	50.329.698,00	108.699.220,00	99.516.848,00	-9.182.372,00	APBD KABUPATEN	



NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A N
									INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							PEMELIHARAAN/R EHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH/LUAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ DIREHABILITASI	GEDUNG DAN M2	1 GEDUNG/ 640 M2	1 GEDUNG (640 M2)	85.000,00	22.915.000,00	14.860.000,00	-8.055.000,00	APBD KABUPATEN	
							PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	UNIT	1 UNIT	1 UNIT	21.350.000,00	31.528.932,00	33.140.848,00	1.611.916,00	APBD KABUPATEN	
							PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	UNIT	5 UNIT	5 UNIT	28.754.698,00	46.755.288,00	45.766.000,00	-989.288,00	APBD KABUPATEN	
							PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	JUMLAH/JENIS PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	JENIS	3 JENIS	3 JENIS	140.000,00	7.500.000,00	5.750.000,00	-1.750.000,00	APBD KABUPATEN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	TERCAPAINYA PERTUMBUHAN JUMLAH INVESTOR	CAKUPAN PERTUMBUHAN JUMLAH INVESTOR	JUMLAH INVESTOR	137 INVESTOR	137 INVESTOR	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
							PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. TERSEDIAANYA DOKUMEN/LAPORAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. JUMLAH DAN JENIS DOKUMEN/LAPORAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JENIS DOKUMEN/ LAPORAN	2 JENIS DOKUMEN	2 JENIS DOKUMEN/ LAPORAN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A T A N
									INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	1. TERSEDIANYA DOKUMEN CETAK BIRU (MASTER PLAN) PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 2. TERSEDIANYA DOKUMEN FEASIBILITY STUDY POTENSI PELUANG INVESTASI 3. TERSEDIANYA DOKUMEN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DITETAPKAN 4. TERSEDIANYA KAJIAN DAN PELUANG INVESTASI DAERAH	1. JUMLAH DOKUMEN CETAK BIRU (MASTER PLAN) PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 2. JUMLAH DOKUMEN FEASIBILITY STUDY POTENSI PELUANG INVESTASI 3. JUMLAH DOKUMEN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DITETAPKAN 4. JUMLAH KAJIAN DAN PELUANG INVESTASI DAERAH	1. DOKUMEN 2. DOKUMEN 3. DOKUMEN 4. DOKUMEN	1. 1 DOKUMEN 2. 1 DOKUMEN 3. 1 DOKUMEN 4. 1 DOKUMEN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN		
							EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTI F DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	1. TERLAKSANANYA KEGIATAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 2. TERLAKSANANYA KEGIATAN PELAPORAN REALISASI PMA & PMDN	1. JUMLAH KEGIATAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 2. JUMLAH KEGIATAN PELAPORAN REALISASI PMA & PMDN	1. KEGIATAN/ LAPORAN 2. KEGIATAN/ LAPORAN	1. 2 KEGIATAN/ LAPORAN 2. 2 KEGIATAN/ LAPORAN			-	APBD KABUPATEN			
						PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	TERSEDIANYA DOKUMEN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DAN JENIS DOKUMEN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	JENIS DOKUMEN	2 JENIS DOKUMEN	2 JENIS DOKUMEN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN		
							PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSEDIANYA DOKUMEN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DOKUMEN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA	DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
							PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/KOTA	TERSEDIANYA DOKUMEN KAJIAN PELUANG USAHA DAN PETA POTENSI USAHA KABUPATEN/KOTAUSAHA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DOKUMEN KAJIAN PELUANG USAHA DAN PETA POTENSI USAHA KABUPATEN/KOTAUSAHA KABUPATEN/KOTA	DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	TERCAPAINYA PENINGKATAN KEGIATAN PUBLIKASI PELUANG INVESTASI	CAKUPAN PENINGKATAN PELUANG INVESTASI YANG TERPUBLIKASI	%	10	10%	62.290.000,00	68.355.000,00	65.681.000,00	-2.674.000,00	APBD KABUPATEN		

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A N
									INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSEDINYA DOKUMEN/LAPORAN EVENT PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH/JENIS DOKUMEN/LAPORAN EVENT PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JENIS DOKUMEN/ LAPORAN	2 EVENT/ LAPORAN	2 JENIS DOKUMEN/ LAPORAN	62.290.000,00	68.355.000,00	65.681.000,00	-2.674.000,00	APBD KABUPATEN	
							PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL	1. TERSELENGGARANYA KEGIATAN/MEDIA STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL 2. TERJALINNYA KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL/ INVESTASI 3. TERSEDINYA LAPORAN REALISASI PMA DAN PMDN 4. TERSEDINYA DOKUMEN KAJIAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	1. JUMLAH/JENIS KEGIATAN/MEDIA STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL 2. JUMLAH KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL/ INVESTASI YANG DIJALIN 3. JUMLAH PELAPORAN REALISASI PMA DAN PMDN 4. JUMLAH DOKUMEN KAJIAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	1. KEGIATAN/ MEDIA 2. KEGIATAN/ LAPORAN 3. DOKUMEN 4. DOKUMEN	1. 2 KEGIATAN/ MEDIA 2. 1 KEGIATAN/ LAPORAN 3. 1 DOKUMEN 4. 1 DOKUMEN	1. 2 KEGIATAN/ MEDIA 2. 1 KEGIATAN/ LAPORAN 3. 1 DOKUMEN 4. 1 DOKUMEN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
							PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSEDINYA LAPORAN EVENT/PAMERAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG DIHUKTI	JUMLAH LAPORAN EVENT/PAMERAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG DIHUKTI	LAPORAN/ PAMERAN	2 LAPORAN/ PAMERAN	2 LAPORAN/ PAMERAN	62.290.000,00	68.355.000,00	65.681.000,00	-2.674.000,00	APBD KABUPATEN	
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL	CAKUPAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL	%	70	70%	170.199.246,00	522.322.500,00	710.946.920,00	188.624.420,00	APBD KABUPATEN	
							PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	TERPENUHINYA KETEPATAN JANGKA WAKTU PENERBITAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SESUAI SOP	JUMAH JANGKA WAKTU PENERBITAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG TEPAT WAKTU SESUAI SOP	HARI KERJA	7 HARI KERJA	7 HARI KERJA	170.199.246,00	522.322.500,00	710.946.920,00	188.624.420,00	APBD KABUPATEN	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A N
									INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	1. TERSELENGGARANYA KEGIATAN/PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 2. TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE SERVICE	1. JUMLAH/JENIS KEGIATAN/PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 2. JUMLAH/JENIS KEGIATAN/PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE SERVICE YANG DIKELOLA	1. KEGIATAN/ SISTEM 2. KEGIATAN/ SISTEM	1. 2 SISTEM/ APLIKASI 2. 2 SISTEM/ APLIKASI	1. 2 KEGIATAN/ SISTEM 2. 2 KEGIATAN/ SISTEM	4.854.246,00	78.642.500,00	91.281.700,00	12.639.200,00	APBD KABUPATEN	
							PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	1. TERSEDIAANYA DOKUMEN PENGAJUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIEVALUASI DAN DIVERIFIKASI 2. TERSEDIAANYA DATA IDENTIFIKASI OBJEK PERIZINAN 3. TERSEDIAANYA DATA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI OBJEK PENDAPATAN 4. TERSEDIAANYA LAPORAN POTENSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 5. TERSELENGGARANYA SOSIALISASI PELAYANAN PERIJINAN	1. JUMLAH DOKUMEN PENGAJUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIEVALUASI DAN DIVERIFIKASI 2. JUMLAH OBJEK PERIZINAN YANG TERIDENTIFIKASI 3. JUMLAH OBJEK PENDAPATAN YANG DI INTENSIFIKASI DAN DI EKSTENSIFIKASI 4. JUMLAH LAPORAN POTENSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 5. JUMLAH SEBARAN SOSIALISASI PELAYANAN PERIJINAN YANG DISELENGGARAKAN	1.DOKUMEN 2. OBJEK PERIZINAN 3. OBJEK PENDAPATAN 4. LAPORAN 5. DESA	1. 250DOKUMEN 2. 250 OBJEK PERIZINAN 3. 250 OBJEK PENDAPATAN 4. 1 LAPORAN 5. 15 DESA	1. 250DOKUMEN 2. 250 OBJEK PERIZINAN 3. 250 OBJEK PENDAPATAN 4. 1 LAPORAN 5. 15 DESA	156.800.000,00	418.045.000,00	587.353.375,00	169.308.375,00	APBD KABUPATEN	
							PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	TERSELENGGARANYA PELAYANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN PENYELESAIAN PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN YANG TERTANGANI	TAHUN PELAYANAN	1 TAHUN PELAYANAN	1 TAHUN PELAYANAN	8.545.000,00	25.635.000,00	32.311.845,00	6.676.845,00	APBD KABUPATEN	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A T A N
									INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTI F DAERAH	1. TERSEDIAANYA DOKUMEN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH YANG DITETAPKAN DAN/ATAU YANG DIKAJI 2. TERSEDIAANYA LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 3. TERSEDIAANYA LAPORAN PERSEPSI KORUPSI	1. JUMLAH DOKUMEN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH YANG DITETAPKAN DAN/ATAU YANG DIKAJI 2. JUMLAH LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 3. JUMLAH LAPORAN PERSEPSI KORUPSI	1. DOKUMEN 2. LAPORAN 3. LAPORAN	1. 0 DOKUMEN 2. 1 DOKUMEN 3. 1 DOKUMEN	1. N/A DOKUMEN 2. 1 LAPORAN 3. 1 LAPORAN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	TERCAPAINYA KEPATUHAN INVESTOR PMDN DAN PMA DALAM MELAPORKAN NILAI INVESTASINYA	CAKUPAN KEPATUHAN PENDATAAN NILAI INVESTASI PMDN & PMA TERHADAP PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI DAERAH	MILYAR RUPIAH	322,1 MILYAR RUPIAH	322,1 MILYAR RUPIAH	42.278.800,00	372.401.650,00	372.401.650,00	-		
							PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANYA KEGIATAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH/JENIS KEGIATAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN	JENIS KEGIATAN	3 JENIS KEGIATAN	3 JENIS KEGIATAN	42.278.800,00	372.401.650,00	372.401.650,00	-		
							KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. TERSEDIAANYA DATA ANALISA PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL 2. TERLAKSANYA KUNJUNGAN KE LOKASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG DIFOKUSKAN PADA PEMANTAUAN TERHADAP REALISASI INVESTASI 3. TERLAKSANYA VERIFIKASI DAN EVALUASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) YANG DISAMPAIKAN OLEH PELAKU USAHA UNTUK SELANJUTNYA DITERUSKAN KE BKPM MELALUI SISTEM OSS	1. JUMLAH DATA PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIANALISA 2. JUMLAH KUNJUNGAN KE LOKASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG DIFOKUSKAN PADA PEMANTAUAN TERHADAP REALISASI INVESTASI 3. JUMLAH VERIFIKASI DAN EVALUASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) YANG DISAMPAIKAN OLEH PELAKU USAHA UNTUK SELANJUTNYA DITERUSKAN KE BKPM MELALUI SISTEM OSS	1. KEGIATAN/ LAPORAN 2. KEGIATAN/ LAPORAN 3. KEGIATAN/ LAPORAN	1. 9 KEGIATAN/ LAPORAN 2. 9 KEGIATAN/ LAPORAN 3. 9 KEGIATAN/ LAPORAN	1. 9 KEGIATAN/ LAPORAN 2. 9 KEGIATAN/ LAPORAN 3. 9 KEGIATAN/ LAPORAN	16.820.000,00	50.820.000,00	50.820.000,00	-		DAK NON FISIK PROV JAWA BARAT

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A N
									INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							COORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. TERSELENGGARANYA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM OSS DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM LKPM ONLINE 2. TERSELENGGARANYA SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN SOSIALISASI KEMITRAAN USAHA	1. JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS SISTEM OSS DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM LKPM ONLINE 2. JUMLAH SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN SOSIALISASI KEMITRAAN USAHA YANG DISELENGGARAKAN	1. KEGIATAN/ LAPORAN 2. KEGIATAN/ LAPORAN	1. 9 KEGIATAN/ LAPORAN 2. 9 KEGIATAN/ LAPORAN	1. 9 KEGIATAN/ LAPORAN 2. 9 KEGIATAN/ LAPORAN	25.458.800,00	227.201.800,00	227.201.800,00	-	DAK NON FISIK PROV JAWA BARAT	
							COORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. TERLAKSANANYA FASILITASI TERHADAP HAMBATAN/ PERMASALAHAN PERUSAHAAN DALAM MEREALISASIKAN INVESTASINYA 2. TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMERIKSAAN KE LOKASI PROYEK DALAM RANGKA PENGAWASAN 3. TERLAKSANYA KEGIATAN EVALUASI PERIZINAN DAN/ATAU PERIZINAN BERUSAHA	1. JUMLAH FASILITASI PERMASALAHAN PERUSAHAAN DALAM MEREALISASIKAN INVESTASINYA 2. JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN KE LOKASI PROYEK DALAM RANGKA PENGAWASAN 3. JUMLAH PELAKSANAAN PERIZINAN DAN/ATAU PERIZINAN BERUSAHA YANG DIEVALUASI	1. KEGIATAN/ LAPORAN 2. KEGIATAN/ LAPORAN 3. KEGIATAN/ LAPORAN	1. 14 KEGIATAN/ LAPORAN 2. 14 KEGIATAN/ LAPORAN 3. 14 KEGIATAN/ LAPORAN	1. 14 KEGIATAN/ LAPORAN 2. 14 KEGIATAN/ LAPORAN 3. 14 KEGIATAN/ LAPORAN	-	94.379.850,00	94.379.850,00	-	DAK NON FISIK PROV JAWA BARAT	
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	TERCAPAINYA PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	CAKUPAN PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	%	3	3%	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	
							PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSEDIAANYA LAPORAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	

NO.	KODE	SKPD/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN PADA TRIWULAN II 2021 (RP)	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA	C A T A N
									INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	TERSEDIAANYA LAPORAN PEMANFAATAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	JUMLAH LAPORAN PEMANFAATAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	-	-	-	-	APBD KABUPATEN	

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan proses awal penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada Perubahan RPJMD dan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. Semua rangkaian ketetapan program dan kegiatan, strategi dan kebijakan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengusung pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan uraian rencana program dan kegiatan prioritas yang perlu mendapat perhatian penting dalam pelaksanaannya karena akan menentukan keberhasilan terwujudnya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran serta mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pangandaran.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara seluruh Pegawai di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran serta para pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran.

Semoga DPMPTSP Kabupaten Pangandaran mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja dan kinerja.

Parigi, 19 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN,



DR.H.SOBIRIN,S.Pd.,M.Pd
NIP 196308181984101005